

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kemiskinan

Secara etimologis, kemiskinan berasal dari kata “miskin” yang berarti tidak memiliki berharta, serba kekurangan atau berpenghasilan sangat rendah. Kemiskinan didefinisikan sebagai terjadinya kondisi ketidakmampuan dalam pemenuhan standar hidup minimum. Kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tersebut meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan (Kuncoro, 1997).

Menurut Badan Pusat Statistik (2023) kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama satu bulan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan.

Menurut Bappenas dalam Badan Pusat Statistik (2023) kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan individu atau kelompok, baik laki-laki maupun perempuan, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan untuk menjalani dan meningkatkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar

tersebut mencakup akses terhadap pangan, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, air bersih, kepemilikan lahan, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, perlindungan dari ancaman kekerasan, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial-politik tanpa diskriminasi gender.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kapabilitas Sen. Menurut Amartya Sen dalam Todaro dan Smith (2011) menyatakan bahwa kemiskinan bukan sekadar rendahnya pendapatan, melainkan keterbatasan individu dalam mengakses kesempatan untuk mengembangkan potensi diri dan memperoleh kebebasan substantif.

Melalui pendekatan kapabilitas, Sen mengemukakan bahwa setiap individu memiliki kapabilitas yang berbeda dalam mencapai sesuatu yang dianggap bernilai. Perbedaan kapabilitas ini mempengaruhi seseorang untuk mengubah pendapatan dan hal-hal pokok (*primary goods*) lainnya menjadi kebebasan yang bernilai dalam kehidupan. Teori ini menjadi dasar penting dalam memahami kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat (Sunaryo, 2017).

Kapabilitas setiap individu pada dasarnya tidak sama. Perbedaan kondisi pribadi setiap individu dan perbedaan tempat tinggal akan membuat kapabilitas setiap orang menjadi berbeda. Sen mengidentifikasi empat hal yang harus diperhatikan dalam melihat kapabilitas individu atau kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Keragaman Pribadi (*heterogenitas personal*)

Menurut Sen, setiap individu memiliki karakteristik fisik yang berbeda, mencakup variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, level

ketidakberdayaan, kecenderungan penyakit, serta berbagai atribut personal lainnya.

2. Perbedaan Alam dan Lingkungan

Kemampuan untuk mengubah pendapatan menjadi sesuatu yang bernilai sangat bergantung pada kondisi alam dan lingkungan. Perbedaan kondisi alam dan lingkungan tempat tinggal berimplikasi pada perbedaan kapasitas masyarakat dalam mengubah sumber daya yang dimiliki menjadi capaian yang diharapkan. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti iklim, ketersediaan sumber daya alam, dan infrastruktur dasar.

3. Perbedaan Kondisi Sosial

Kondisi sosial meliputi masalah sistem pelayanan kesehatan publik, epidemiologi, tata kelola pendidikan publik, tingkat kekerasan, kriminalitas dan lain-lain. Faktor-faktor ini membentuk kerangka institusional yang memengaruhi kapabilitas individu dalam mencapai kesejahteraan.

4. Perspektif Relasi dan Keterlibatan dalam Komunitas

Dimensi ini menekankan pentingnya hubungan sosial dan partisipasi dalam komunitas sebagai faktor yang mempengaruhi kapabilitas individu. Melalui keberagaman faktor, Sen hendak menunjukkan dalam masalah kemiskinan, perlu dilihat kesempatan atau kemampuan setiap orang dalam mengubah kondisi yang ada menjadi sesuatu yang bernilai. Selain itu, keberagaman faktor juga dapat digunakan untuk melihat posisi seseorang dalam sebuah tata sosial dan dalam perumusan kebijakan yang harus diambil pemerintah.

Menurut Badan Pusat Statistik (2023) penyebab kemiskinan dibagi menjadi dua, yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain “seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin”.

Todaro dan Smith (2011) menyebutkan bahwa penyebab kemiskinan yang terjadi pada negara berkembang antara lain:

1. Pendapatan nasional yang rendah dan lambatnya laju pertumbuhan ekonomi.
2. Rendahnya pendapatan per kapita di negara berkembang.
3. Distribusi pendapatan diantara penduduk tidak merata.
4. Sebagian besar penduduk dinegara berkembang berjuang dengan kemiskinan ekstrem
5. Layanan dan infrastruktur kesehatan yang buruk dan tidak memadai menjadi pemicu kekurangan gizi dan berbagai wabah penyakit.
6. Infrastruktur dan program pendidikan yang umumnya tidak relevan dan kurang memadai.

Menurut Badan Pusat Statistik (2023) konsep kemiskinan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Kemiskinan absolut

Kondisi seseorang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

2. Kemiskinan Relatif

Kondisi seseorang karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20% atau 40 % lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk.

Badan Pusat Statistik (2023) mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), indikator yang digunakan antara lain:

1. Persentase Penduduk Miskin (*Head Count Index* atau P0) yaitu proporsi penduduk hidup dibawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk yang hidup dalam

kemiskinan menurun jumlahnya seiring dengan menurunnya angka P0. menunjukkan semakin sedikitnya jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Sebaliknya, penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat seiring dengan peningkatan angka P0.

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* atau P1) yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. P1 menggambarkan perbedaan atau kesenjangan antara garis kemiskinan dan pendapatan rata-rata yang diperoleh penduduk miskin. Semakin tinggi angka ini maka semakin besar perbedaan antara pengeluaran penduduk miskin dan garis kemiskinan atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks menunjukkan semakin buruk kondisi ekonomi penduduk miskin.
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* atau P2) yaitu menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Distribusi pendapatan di kalangan penduduk miskin akan lebih merata bila angka ini lebih rendah.

Foster-Greer-Thorbecke (1984) merumuskan ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan sebagai berikut:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Keterangan:

$\alpha = 0, 1, 2$

z = Garis kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis

kemiskinan ($i=1, 2, \dots, q$) $\gamma_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat konsumsi seseorang dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk konsumsi orang perbulan. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Adapun rumus perhitungan garis kemiskinan yaitu:

$$\mathbf{GK=GKM+GKNM}$$

Keterangan:

GK : Garis Kemiskinan

GKM : Garis Kemiskinan Makanan

GKNM : Garis Kemiskinan Non Makanan

Menurut Badan Pusat Statistik (2023) tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2.100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada di lapisan bawah), dan konsumsi non makanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan. Jika pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan, maka orang atau rumah tangga tersebut dikategorikan miskin.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional, dan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat daerah (Badan Pusat Statistik, 2024).

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara atau daerah. Kenaikan PDB atau PDRB mencerminkan peningkatan kapasitas produksi yang dapat menghasilkan tambahan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu. Hal ini juga menunjukkan adanya perbaikan dalam aktivitas perekonomian yang melibatkan berbagai sektor seperti industri, perdagangan, pertanian, jasa, dan sektor-sektor produktif lainnya.

Dalam konteks makroekonomi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan perbaikan infrastruktur yang pada akhirnya berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan standar hidup masyarakat. Namun, pertumbuhan ekonomi perlu diimbangi dengan pemerataan distribusi pendapatan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

PDRB sebagai indikator ekonomi di tingkat daerah memiliki peran strategis dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan nilai tambah bruto. Melalui perhitungan PDRB, pemerintah daerah

dapat mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di wilayahnya, serta merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Selain itu, PDRB juga menjadi alat ukur untuk membandingkan kinerja ekonomi antar daerah dan mengevaluasi kesenjangan pembangunan wilayah. Data PDRB dapat membantu pemerintah daerah dalam menganalisis struktur perekonomian, mengidentifikasi potensi investasi, serta merumuskan strategi pengembangan wilayah yang sesuai dengan karakteristik dan keunggulan komparatif masing-masing daerah. Hal ini sangat penting dalam konteks otonomi daerah, di mana setiap wilayah memiliki kewenangan untuk mengembangkan potensi ekonominya secara optimal.

Menurut Badan Pusat Statistik (2024) Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Dengan adanya produksi barang dan jasa di dalam sebuah wilayah maka akan turut memberikan kontribusi terhadap pertambahan pemasukan pada wilayah tersebut. Bertambahnya nilai akhir sebuah barang dan jasa di suatu wilayah tertentu maka akan berdampak pada pertambahan perolehan PDRB wilayah tersebut sehingga perekonomian akan meningkat, yang pada akhirnya jika terjadi peningkatan pada perekonomian di suatu wilayah maka akan mendorong bertambahnya pertumbuhan ekonomi dalam skala nasional yang kemudian berdampak kepada menurunnya angka kemiskinan (Laoh et al., 2023).

Terdapat dua metode yang digunakan untuk menghitung PDRB, yaitu:

1. Metode Langsung

terdapat tiga pendekatan untuk menghitung metode langsung yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Namun, masing-masing dari metode ini menghasilkan hasil yang sama. Ketiga pendekatan dalam perhitungan PDRB dijelaskan sebagai berikut:

- A. Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah selama periode tertentu (satu tahun). Perhitungan PDRB dengan pendekatan produksi disebut juga perhitungan melalui pendekatan nilai tambah (*value added*). Nilai tambah merupakan selisih antar nilai produksi dan nilai biaya antara. Biaya antara adalah nilai barang dan jasa yang digunakan sebagai input antara dalam proses produksi.

Barang dan jasa yang termasuk input antara adalah bahan baku yang biasanya habis dalam sekali proses produksi atau mempunyai umur penggunaan kurang dari setahun. Pengeluaran atau balas jasa faktor produksi seperti upah dan gaji, sewa tanah, bunga, modal, dan keuntungan yang diterima perusahaan bukan termasuk biaya antara. Begitu juga dengan penyusutan dan pajak tidak langsung neto bukan merupakan biaya antara

Adapun rumus perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan produksi yaitu sebagai berikut:

$$Y = \Sigma (P \times Q)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan nasional

P = Harga barang dan jasa

Q = Jumlah barang dan jasa yang diproduksi

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sektor yang digunakan untuk memperkirakan nilai tambah menggunakan pendekatan produksi yaitu Pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estat; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya.

B. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Berdasarkan pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat (pemilik faktor produksi) sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi meliputi upah/gaji, sewa, bunga, dan keuntungan. Adapun rumus perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan pendapatan yaitu sebagai berikut:

$$Y = w + r + i + p$$

Keterangan:

Y = Pendapatan nasional

r = Pendapatan dari upah/gaji

w = Pendapatan bersih dari sewa

i = Pendapatan dari bunga

p = Pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan

C. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Berdasarkan pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi (konsumen, produsen, dan pemerintah) dalam suatu negara, meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran konsumsi pemerintah, ekspor dan impor. Adapun rumus perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan pengeluaran yaitu sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan nasional

C = *Consumption* (konsumsi rumah tangga)

I = *Investment* (investasi)

G = *Government expenditure* (pengeluaran pemerintah)

X = Ekspor

M = Impor

2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung untuk menghitung PDRB provinsi adalah dengan mengalokasikan jumlah Produk Domestik Bruto Indonesia untuk setiap provinsi dengan menggunakan alokator tertentu; alokator ini dapat termasuk nilai produk bruto atau neto setiap sektor, jumlah produksi fisik, tenaga kerja, populasi, dan alokator lainnya yang relevan. Nilai tambah suatu sektor atau sub sektor dapat dihitung dengan persentase atau bagian masing-masing provinsi dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari alokator tersebut.

Dalam penyajiannya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disusun menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan

Perhitungan PDRB atas dasar harga konstan merupakan jumlah seluruh nilai tambah bruto atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu periode tertentu yang dihitung menurut harga dasar. Dengan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan berguna untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau sektoral serta dapat mengetahui perubahan struktur perekonomian suatu daerah dari tahun ke tahun.

2. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku

Perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku merupakan jumlah seluruh barang dan jasa yang dinilai dengan harga tahun yang bersangkutan. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan besar kecilnya kemampuan sumber daya alam pada tahun yang bersangkutan. Semakin besar nilai PDRB menyebabkan sumber ekonomi yang besar pula, begitu pun sebaliknya.

2.1.3 Pendidikan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Definisi dari Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) kata pendidikan berasal dari kata ‘didik’ serta mendapatkan imbuhan ‘pe’ dan akhiran ‘an’, sehingga kata ini memiliki pengertian sebuah metode, cara maupun tindakan membimbing.

Menurut Amirin dalam Pristiwanti et al., (2022) pendidikan dalam arti luas adalah Hidup. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan mencakup seluruh proses pembelajaran yang berlangsung sepanjang hayat, di berbagai tempat dan situasi yang memberikan dampak positif bagi perkembangan setiap individu. Pendidikan tidak terbatas pada waktu tertentu, melainkan berlangsung seumur hidup (*long life education*). Selain itu, pengajaran dalam pengertian yang lebih luas juga merupakan suatu proses kegiatan mengajar, di mana pembelajaran dapat terjadi di lingkungan manapun dan kapanpun.

Menurut Widiansyah dalam Pristiwanti et al., (2022) berdasarkan pandangan ekonomi, pendidikan merupakan investasi dalam bentuk tenaga kerja yang terdidik dan terampil. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena melalui proses pendidikan, seseorang dapat

mengembangkan keterampilan psikomotorik dan kognitif, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap penciptaan serta peningkatan produktivitas.

Dalam konteks ini, pendidikan dipandang sebagai industri pembelajaran manusia, di mana proses pendidikan menghasilkan individu yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung perekonomian suatu negara, meningkatkan pendapatan pribadi, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang nantinya mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Menurut Badan Pusat Statistik (2023) tujuan pembangunan pendidikan, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif, merata, dan meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Oleh karena itu, pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, maupun waktu. Salah satunya pemerintah juga harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan ekonomi.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, indikator tingkat pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan

Berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, yaitu terdiri dari:

1. Pendidikan dasar: Jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
2. Pendidikan menengah: Jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar.
3. Pendidikan tinggi: Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Menurut Badan Pusat Statistik (2023) salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat pendidikan adalah Angka Melek Huruf (AMH). Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Indikator ini menggambarkan mutu sumber daya manusia yang diukur dari kemampuan baca tulis masyarakat. Angka Melek Huruf (AMH) diukur dengan proporsi penduduk usia >15 tahun yang bisa membaca dan menulis dengan rumus sebagai berikut:

$$AMH_{15+}^t = \frac{MH_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100\%$$

Keterangan:

MH_{15+}^t = Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya

P_{15+}^t = Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas

AMH menjadi indikator penting karena kemampuan baca tulis merupakan dasar untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan lebih lanjut. Tingkat melek huruf yang tinggi dalam suatu masyarakat mencerminkan keberhasilan program pendidikan dasar dan kesempatan yang lebih baik bagi masyarakat untuk mengakses informasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.

2.1.4 Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Menurut Sukirno (2004) pengangguran didefinisikan sebagai keadaan ketika seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum berhasil memperolehnya. Pengangguran terjadi karena jumlah tenaga kerja yang tersedia lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kesempatan kerja yang ada.

Berdasarkan penyebabnya Sukirno (2004) mengklasifikasikan pengangguran ke dalam beberapa jenis, antara lain:

1. Pengangguran normal atau friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.
2. Pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat.
3. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian.
4. Pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia.

Berdasarkan cirinya, pengangguran dibagi menjadi empat kelompok:

1. Pengangguran terbuka

Pengangguran terbuka terjadi karena tidak adanya lowongan pekerjaan, tingkat kesempatan kerja lebih rendah dibanding dengan tenaga kerja yang lebih tinggi. Hal ini berdampak tidak adanya pekerjaan yang menyebabkan mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, hal ini disebut dengan pengangguran terbuka.

2. Pengangguran tersembunyi

Pengangguran tersembunyi merupakan pengangguran yang para pekerjaanya bekerja pada perusahaan yang mempekerjakan banyak tenaga kerja sehingga pekerja tersebut tidak bekerja sesuai dengan keterampilan atau keahlian dengan latar belakang pendidikannya. Mereka sebenarnya tidak menganggur namun

bekerja. Akan tetapi pekerjaannya tidak sesuai dengan bidang keahlian yang berlatang belakang pendidikannya.

3. Pengangguran musiman

Pengangguran musiman terjadi karena perubahan musim atau perubahan dalam permintaan tenaga kerja secara berkala. Pengangguran ini sering terjadi pada sektor pertanian. Karena dalam sektor pertanian sangat tergantung pada musim-musim tertentu para tenaga kerja dapat mengolah sektor pertaniannya. Terdapat tenaga kerja pertanian yang menganggur di musim kering atau setelah panen. Sebagian petani akan menganggur sambil menunggu masa tanam.

4. Pengangguran setengah menganggur

Tenaga kerja yang bekerja, tetapi bila diukur dari lamanya bekerja, pendapatan, produktivitas, dan jenis pekerjaannya tidak optimal atau masih kurang. Pekerja dengan jam normal yaitu 30-40 jam perminggu. Pengangguran ini benar-benar memiliki pekerjaan tetapi bekerja di bawah jam normal pekerja. Pengangguran ini sering disebut juga dengan *Under Unemployment*.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator utama dalam mengukur pengangguran. Indikator TPT ini menggambarkan proporsi penduduk dalam angkatan kerja yang sedang menganggur dan aktif mencari pekerjaan dalam suatu wilayah dan periode tertentu. Tingkat pengangguran terbuka dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TPT = \left(\frac{\text{Jumlah Penganggur}}{\text{Angkatan Kerja}} \right) \times 100\%$$

Tingginya TPT memiliki dampak yang sangat kompleks terhadap kemiskinan. Ketika angka pengangguran meningkat, pendapatan masyarakat akan

menurun secara drastis, yang pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan di mana masyarakat tidak memiliki akses yang memadai untuk keluar dari keterbatasan ekonomi.

2.1.5 Infrastruktur Ekonomi

Menurut Todaro dan Smith (2011) infrastruktur ekonomi merupakan berbagai fasilitas fisik dan sistem layanan yang menjadi dasar bagi kegiatan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Infrastruktur ekonomi mencakup elemen-elemen penting yang mendukung produktivitas, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi, seperti transportasi, energi, komunikasi, air dan sanitasi, serta fasilitas lainnya.

Dalam konteks infrastruktur ekonomi, sanitasi menjadi salah satu indikator penting yang mencerminkan tingkat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa fasilitas sanitasi layak merupakan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, di mana fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sanitasi layak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$PLSL = \frac{JRTSL}{JRTS} \times 100\%$$

Keterangan:

PLSL = Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak

JRTSL = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak

JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya

Menurut Notoadmojo dalam Sa'ban et al., (2021) menyatakan sanitasi merupakan perilaku disengaja dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan lainnya dalam rangka membudayakan perilaku hidup bersih dengan harapan usaha tersebut akan dapat menjaga serta meningkatkan kesehatan manusia.

Menurut Soeranto dalam Rizki dan Saleh (2007) pembangunan bidang sanitasi meliputi pembangunan dalam bidang pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, dan aliran pembuangan (drainase). Ketiga bidang sanitasi tersebut dikembangkan dalam upaya meningkatkan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menghimpun beberapa penelitian terdahulu yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Purnomo et al., (2023) <i>The Effect of Unemployment Rate, Education Level and Total Population on</i>	• Pendidikan • Pengangguran • Kemiskinan • Menggunakan analisis	• Pertumbuhan Ekonomi • Infrastruktur Ekonomi • Subjek penelitian di 5 Provinsi Termiskin	Jumlah penduduk dan pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan pengangguran berpengaruh positif	<i>Indonesian Journal of Advanced Research</i> (IJAR) Vol. 2, No. 5, 2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Poverty in West Java Province</i>	regresi data panel	tahun 2015-2023	dan signifikan terhadap kemiskinan.	
2.	Andriaswati dan Utami (2022) <i>Determinants of Poverty Rates in Papua Province in 2011-2019</i>	• Pertumbuhan Ekonomi • Kemiskinan • Menggunakan analisis regresi data panel	• Pendidikan • Pengangguran • Infrastruktur Ekonomi • Objek penelitian di 5 Provinsi Termiskin tahun 2015-2023	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua tahun 2011-2019.	<i>Efficient Vol</i> 5 (1) (2022): 1453-1467
3.	Lavenia et al., (2023) Pengaruh PDRB, Upah Minimum, Pengangguran, Jumlah Penduduk dan AMH Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2021	• PDRB • Pengangguran • AMH • Kemiskinan • Menggunakan analisis regresi data panel	• Infrastruktur Ekonomi • Objek penelitian di 5 Provinsi Termiskin tahun 2015-2023	PDRB, pengangguran, dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan upah minimum dan angka melek huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.	Jurnal Ekonomi Trisakti https://www.e-
4.	Mandey et al., (2023) Analisis Pengaruh PDRB, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di	• PDRB • Kemiskinan	• Pengangguran • AMH • Infrastruktur Ekonomi • Menggunakan analisis regresi data panel • Objek penelitian di 5	PDRB dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan, RLS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 23 No.1 Bulan Januari 2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kabupaten Kepulauan Talaud		Provinsi Termiskin tahun 2015- 2023		
5.	Kiray et al., (2023) Pengaruh PDRB dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Toraja Utara	• PDRB • Kemiskinan	• Pengangguran • Pendidikan • Infrastruktur • Ekonomi • Menggunakan analisis regresi data panel • Objek penelitian di 5 Provinsi Termiskin tahun 2015-2023	PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan, IPM berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 23 No. 7 Agustus 2023
6.	Azizah et al., (2023) Analisis Pengaruh PDRB dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2018-2022	• PDRB • Pengangguran • Kemiskinan • Menggunakan analisis regresi data panel	• Pendidikan • Infrastruktur • Ekonomi • Objek penelitian di 5 Provinsi Termiskin tahun 2015-2023	PDRB dan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia Tahun 2018-2022.	JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar Volume 2, Nomor 1, Maret 2023
7.	Fitriana dan Gravitiani (2022) Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Indeks Pembangunan Manusia,	• Infrastruktur • Ekonomi • Layak • Kemiskinan • Menggunakan analisis	• Pertumbuhan Ekonomi • Pengangguran • Pendidikan • Objek penelitian di 5	Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. IPM dan pendapatan per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap	Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan P- ISSN 1412 – 2200 E-ISSN 2548

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pendapatan Per Kapita dan Infrastruktur Ekonomi Layak Terhadap Kemiskinan di 5 Provinsi Jawa tengah	regresi data panel	Provinsi Termiskin tahun 2015-2023	kemiskinan, sedangkan Infrastruktur Ekonomi layak berpengaruh negatif, namun tidak signifikan terhadap kemiskinan.	– 1851 Vol. 22 No. 1, Maret, 2022, Page 44-56
8.	Suherman et al., (2022) Pengaruh IPM, Pertumbuhan Penduduk dan TPT Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi	• TPT • Kemiskinan	• Pertumbuhan Ekonomi • Pendidikan • Infrastruktur Ekonomi • Menggunakan analisis regresi data panel • Objek penelitian di 5 Provinsi Termiskin tahun 2015-2023	IPM dan pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan, TPT berpengaruh negatif dan signifikan tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi.	Jurnal Manajemen dan Sains, 7(2), Oktober 2022, 1319-1327 Program Magister Manajemen Universitas Batanghari ISSN 2541-6243
9.	Aini dan Nugroho (2023) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Pengangguran, dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa	• Pertumbuhan Ekonomi • Pengangguran • AMH • Kemiskinan • Menggunakan analisis regresi data panel	• Infrastruktur Ekonomi • Objek penelitian di 5 Provinsi Termiskin tahun 2015-2023	Pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan, pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.	Buletin Ekonomika Pembangunan https://journal.trunojoyo.ac.id/bep Vol.4 No.1 Februari 2023, hal 20-36

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Timur tahun 2013-2020				
10.	Utami dan Udjianto (2023) Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan	• Pertumbuhan Ekonomi • Pendidikan • Pengangguran • Kemiskinan	• Infrastruktur Ekonomi • Menggunakan analisis regresi data panel • Objek penelitian di 5 Provinsi Termiskin tahun 2015-2023	Pertumbuhan ekonomi dan Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.	EBISMEN Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen, Vol.1, No.3 September 2022 e- ISSN: 2962- 7621;
11.	Azriyansyah (2022) Analisis Pengaruh IPM, PDRB dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode Tahun 2017 – 2021	• PDRB • Pengangguran • Kemiskinan • Menggunakan analisis regresi data panel	• Pendidikan • Infrastruktur Ekonomi • Objek penelitian di 5 Provinsi Termiskin tahun 2015-2023	IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran menunjukkan hasil yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan.	EBISMEN Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen, Vol. 1, No. 3 September 2022 e- ISSN: 2962- 7621; p- ISSN: 2962- 763X,
12.	Abdulwasaa dan Kawale (2023) <i>Determinant of Poverty: A Mini- Review</i>	• Pertumbuhan Ekonomi • Pendidikan • Pengangguran • Kemiskinan	• Infrastruktur Ekonomi • Menggunakan analisis regresi data panel • Objek penelitian di 5	Pertumbuhan penduduk yang cepat, peningkatan ukuran keluarga, kesuburan yang tinggi, kesehatan, pendidikan, ketimpangan pendapatan dan inflasi	<i>Current Journal of Applied Science and Technology</i> , 42(21), 27– 36.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Provinsi Termiskin tahun 2015- 2023	memiliki memiliki korelasi kuat dan dampak yang signifikan dengan kemiskinan.	
13.	Sembiring et al., (2023) Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kota-kota Provinsi Jawa Barat	• Pendidikan • Pengangguran • Kemiskinan • Menggunakan analisis regresi data panel	• Pertumbuhan Ekonomi • Infrastruktur Ekonomi • Objek penelitian di 5 Provinsi Termiskin tahun 2015-2023	Jumlah penduduk dan tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kota-kota Provinsi Jawa Barat. Sedangkan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota-kota Provinsi Jawa Barat.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 23(2), 25–36.
14.	Andrianus dan Alfatih (2023) Analisis Pengaruh Infrastruktur terhadap Kemiskinan di Provinsi Indonesia	• Infrastruktur • Kemiskinan • Menggunakan analisis regresi data panel	• Pertumbuhan Ekonomi • Pengangguran • Pendidikan • Objek penelitian di 5 Provinsi Termiskin tahun 2015-2023	Infrastruktur sanitasi, listrik, dan jalan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia.	Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis, vol. 5 no.1 e-ISSN: 2714-8491
15.	Cahyani dan Muljaningsih (2022) Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk,	• Pendidikan • Pengangguran • Kemiskinan	• Pertumbuhan Ekonomi • Infrastruktur Ekonomi	Jumlah penduduk serta tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan,	Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Gresik		• Menggunakan tingkat analisis regresi data negatif tetapi tidak signifikan terhadap panel • Objek kemiskinan di penelitian di 5 Kabupaten Gresik. Provinsi Termiskin tahun 2015-2023	tingkat pengangguran memiliki pengaruh	No.1 (2022) 1-10
16.	Leow dan Tan (2019) <i>Determinants of Poverty: A Dynamic Panel Data Analysis with Controls for Income Level and Inequality</i>	• Pertumbuhan Ekonomi • Kemiskinan • Menggunakan analisis regresi data panel	• Pendidikan • Pengangguran • Infrastruktur Ekonomi • Objek penelitian di 5 Provinsi Termiskin tahun 2015-2023	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif, sedangkan ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan.	<i>Malaysian Journal of Economic Studies</i> 56(2): 227–242, 2019
17.	Pham dan Riedel, (2019) <i>Impacts of the sectoral composition of growth on poverty reduction in Vietnam</i>	• Pertumbuhan Ekonomi • Kemiskinan • Menggunakan analisis regresi data panel	• Pendidikan • Pengangguran • Infrastruktur Ekonomi • Objek penelitian di 5 Provinsi Termiskin tahun 2015-2023	Pertumbuhan ekonomi tidak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.	<i>Journal of Economics and Development</i> Vol. 21 No. 2, 2019 pp. 213-222 Emerald Publishing Limited

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	Tjiabrata et al., (2021) Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Utara	• Pertumbuhan Ekonomi • Pendidikan	• Pengangguran • Infrastruktur Ekonomi • Menggunakan analisis regresi data panel • Objek penelitian di 5 Provinsi Termiskin tahun 2015-2023	Pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 21 No.7 Desember 2021
19.	Abdelmoula dan Abdelsalam (2025) <i>The role of education for alleviating poverty incidence in Egypt: urban-rural analysis</i>	• Pendidikan • Kemiskinan	• Pertumbuhan Ekonomi • Pengangguran • Infrastruktur Ekonomi • Menggunakan analisis regresi data panel • Objek penelitian di 5 Provinsi Termiskin tahun 2015-2023	Potensi pendidikan untuk mengentaskan kemiskinan di daerah pedesaan lebih signifikan daripada di daerah perkotaan Mesir.	<i>Review of Economics and Political Science</i> Emerald Publishing Limited e-ISSN: 2631-3561 p-ISSN: 2356-9980 DOI 10.1108/REPS-05-2022-0033

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	Martini dan Woyanti (2022) Analisis Pengaruh PDRB, IPM, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan 35 Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah (2016-2020)	• PDRB • Pengangguran • Kemiskinan • Menggunakan analisis regresi data panel	• Pendidikan • Infrastruktur Ekonomi • Objek penelitian di 5 Provinsi Termiskin tahun 2015-2023	PDRB dan IPM memiliki pengaruh negatif signifikan, sedangkan pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2016-2020	BISECER (<i>Business Economic Entrepreneurship</i>) Vol. V No. 2, Bulan Juli Tahun 2022

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2013) kerangka berpikir adalah model konseptual yang menggambarkan keterkaitan antara teori dan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai aspek penting dalam suatu permasalahan.

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang secara sistematis menghadirkan tantangan multidimensional dalam proses pembangunan nasional. Meskipun Indonesia telah mengalami transformasi ekonomi signifikan pasca era reformasi, realitas kemiskinan masih menjadi indikator kritis ketidakseimbangan struktural dalam sistem sosial ekonomi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa sebanyak 25,9 juta penduduk, atau sekitar 9,36 persen dari total populasi, masih berada dalam kategori penduduk miskin. Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan representasi nyata dari tantangan berkelanjutan dalam upaya pembangunan inklusif.

Teori kapabilitas yang dikembangkan oleh Amartya Sen mengemukakan bahwa setiap individu memiliki kapabilitas yang berbeda dalam mencapai sesuatu yang dianggap bernilai. Kapabilitas ini tidak hanya mencakup sumber daya material dan pendapatan, tetapi juga meliputi kebebasan substantif yang memungkinkan seseorang untuk menjalani kehidupan yang mereka hargai. Sen berargumen bahwa pembangunan seharusnya difokuskan pada perluasan kapabilitas individu melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan sosial-ekonomi. Pendekatan ini menekankan pentingnya mengukur kesejahteraan tidak hanya dari aspek pendapatan, tetapi juga dari kemampuan individu untuk mengkonversi sumber daya menjadi fungsi-fungsi yang bermakna dalam kehidupan mereka. Lebih lanjut, teori ini menggarisbawahi bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat menghambat pengembangan kapabilitas, sehingga diperlukan intervensi kebijakan yang tepat untuk mengatasi hambatan struktural dalam masyarakat (Sunaryo, 2017).

2.2.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan

Menurut Amartya Sen dalam *Development as Freedom* (1999) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan sarana penting untuk memperluas kebebasan dan kapabilitas masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi tanpa disertai dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan (*ceteris paribus*),

yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan (Tambunan, 2003).

Menurut Kuncoro menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan PDRB secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar ke lapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas dan pada konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Prawitrisari et al., (2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan PDRB dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2011-2022. Artinya, apabila pertumbuhan ekonomi naik maka akan menurunkan tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata menjadi kunci dalam upaya pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan yang hanya terfokus pada peningkatan angka PDRB tanpa memperhatikan aspek distribusi pendapatan dan pemerataan kesempatan kerja dapat menyebabkan ketimpangan sosial yang semakin melebar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,

khususnya kelompok rentan dan berpendapatan rendah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

2.2.2 Hubungan Pendidikan dengan Kemiskinan

Menurut Amartya Sen dalam *Development as Freedom* (1999) menekankan pendidikan sebagai kapabilitas dasar yang memungkinkan seseorang keluar dari kemiskinan. Todaro dan Smith, (2011) menyampaikan bahwa pendidikan adalah salah satu tujuan utama pembangunan. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan suatu negara untuk mengadopsi teknologi modern dan membangun kapasitas guna mendukung pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu indikator keberhasilan pendidikan adalah tingkat melek huruf. Peningkatan jumlah individu yang melek huruf seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pendidikan berkualitas, yang pada gilirannya berhubungan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, kurangnya pendidikan pada sumber daya manusia cenderung berkorelasi dengan tingginya angka kemiskinan. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aini dan Nugroho (2023) yang menyatakan bahwa angka melek huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2020.

Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Lavenia et al., (2023) yang menyatakan bahwa angka melek huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2021, yang berarti ketika

angka melek huruf naik maka akan menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2021.

Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa pendidikan bukan hanya berdampak pada peningkatan kualitas individu, tetapi juga memiliki implikasi makro terhadap pengurangan kemiskinan. Pendidikan yang baik membuka akses terhadap pekerjaan yang layak, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks pembangunan jangka panjang, peningkatan kualitas pendidikan, terutama di daerah tertinggal, harus menjadi prioritas strategis karena berpotensi memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

2.2.3 Hubungan Pengangguran dengan Kemiskinan

Menurut Amartya Sen dalam *Development as Freedom* (1999) menyatakan bahwa pengangguran bukan hanya masalah kehilangan pendapatan tetapi juga kehilangan kapabilitas. Pengangguran dan kemiskinan memiliki hubungan yang erat dan saling memengaruhi. Pengangguran terjadi ketika individu dalam usia produktif tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan kebutuhan mereka. Kondisi ini mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat secara keseluruhan, sehingga kemampuan individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan, menjadi terbatas. Akibatnya, pengangguran berkontribusi langsung terhadap peningkatan angka kemiskinan, karena banyak individu yang kehilangan akses terhadap sumber daya ekonomi yang stabil. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Lavenia et al., (2023) yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2021.

Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan (Azizah et al., 2023) yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2018-2022. Artinya, ketika pengangguran di Indonesia tahun 2018-2022 meningkat, maka kemiskinan di Indonesia tahun 2018-2022 juga akan meningkat.

Korelasi positif antara tingkat pengangguran dan kemiskinan mencerminkan bahwa tingginya jumlah pengangguran merupakan indikator kelemahan struktural dalam pasar tenaga kerja serta ketidakefisienan dalam alokasi sumber daya manusia. Dalam perspektif ekonomi makro, pengangguran yang tinggi menandakan rendahnya permintaan terhadap tenaga kerja yang dapat disebabkan oleh stagnasi pertumbuhan sektor riil, rendahnya investasi, serta ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

2.2.4 Hubungan Infrastruktur Ekonomi dengan Kemiskinan

Menurut Amartya Sen dalam *Development as Freedom* (1999) menekankan bahwa pentingnya akses terhadap infrastruktur sebagai sarana perluasan kapabilitas. Infrastruktur ekonomi, termasuk akses sanitasi yang memadai, memiliki hubungan yang signifikan dengan kemiskinan. Infrastruktur yang baik mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Salah satu indikator penting dari infrastruktur ekonomi adalah akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak. Ketika akses sanitasi buruk, masyarakat rentan terhadap berbagai penyakit, yang tidak hanya membahayakan kesehatan tetapi juga

meningkatkan pengeluaran untuk perawatan medis. Hal ini memperparah kondisi kemiskinan karena pendapatan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan lain terserap oleh biaya kesehatan.

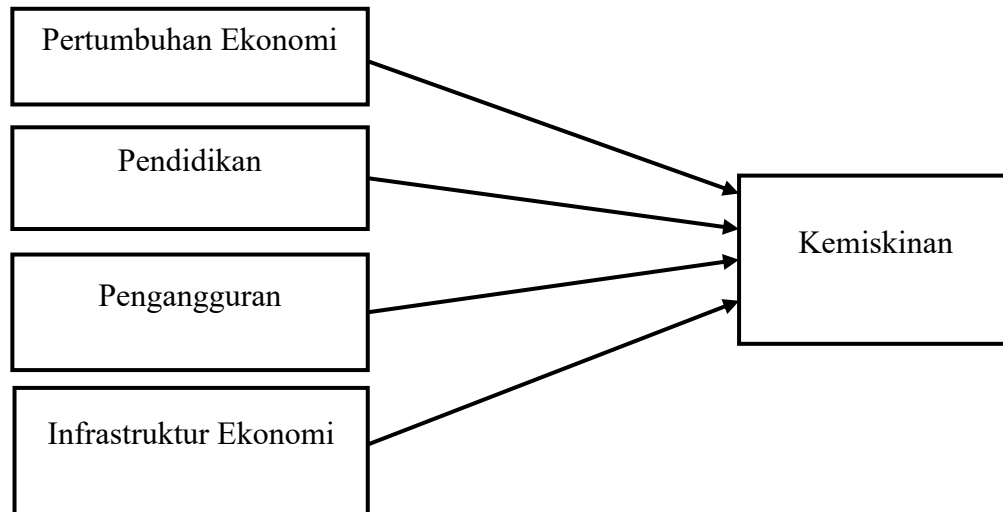
Infrastruktur sanitasi yang memadai juga meningkatkan daya tarik suatu daerah bagi investasi, menciptakan lebih banyak peluang kerja, dan memperkuat perekonomian lokal. Dengan demikian, akses sanitasi yang layak bukan hanya kebutuhan dasar tetapi juga salah satu kunci penting dalam memutus lingkaran kemiskinan dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriana dan Gravitiani (2022) bahwa infrastruktur sanitasi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di 5 Provinsi Jawa Tengah. Hasil tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Andrianus dan Alfatih (2023) bahwa infrastruktur sanitasi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. Artinya, ketika akses sanitasi meningkat, maka kemiskinan akan menurun.

Keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari aspek distribusi dan inklusivitas pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yakni pertumbuhan yang disertai dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan akses yang adil terhadap hasil-hasil pembangunan, menjadi kunci utama dalam menurunkan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pengangguran, dan infrastruktur ekonomi memiliki hubungan yang erat

terhadap kemiskinan, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul. Dalam penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

1. Diduga secara parsial pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur ekonomi berpengaruh negatif, sementara pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di 5 provinsi termiskin tahun 2015-2023.
2. Diduga secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pengangguran, dan infrastruktur ekonomi berpengaruh terhadap terhadap kemiskinan di 5 provinsi termiskin tahun 2015-2023.